

## Pengaruh Politik Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah

Paiman Eliaezer Nadeak<sup>1</sup> Zito Yonatan Sinaga<sup>2</sup> Jessica Evi Margaretha  
Simanjuntak<sup>3</sup> Julia Ivanna<sup>4</sup>

Universitas Negeri Medan

Korespondensi Penulis : [paimannadeak539@gmail.com](mailto:paimannadeak539@gmail.com)

*Abstract* The implementation of direct pilkada was not without problems. The regional head elections which have been held so far have had quite a lot of internal challenges. This research is qualitative research, the determination of informants purposively is also based on subjective reasons which have limited funds, time in conducting this research. The research results show that generally the elite and the public already know that the election Regional Heads and Deputy Regional Heads will be elected directly by the community. There must be in-depth socialization from the government, in this case the KPUD regarding the implementation of the Pilkada as well as the role of elites and existing political parties.

**Keywords:** Attitudes of Local Political Elites, Regional Head Elections

**Abstrak** Pelaksanaan PILKADA secara langsung ternyata bukan tanpa masalah. Pemilihan Kepala Daerah yang telah diselenggarakan selama ini ternyata cukup banyak mendapat tantangan internal penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penentuan informan secara purposif didasari pula oleh alasan subjektif yang memiliki keterbatasan dana, waktu dalam melakukan penelitian ini Hasil Penelitian menunjukkan Umumnya Elite dan masyarakat telah mengetahui bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Harus ada Sosialisasi yang mendalam dari pemerintah dalam hal ini adalah KPUD terhadap pelaksanaan PILKADA serta peran serta Elite dan partai politik yang ada.

**Kata Kunci :** Sikap Elite Politik Lokal, Pemilihan Kepala Daerah

### PENDAHULUAN

Politik dan kekuasaan adalah suatu hal yang ada dan akan dialami oleh setiap organisasi dimana sulit untuk di ukur dan sangat penting serta dapat mempengaruhi manusia dalam organisasi tersebut. Aristoteles dan Plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Pada waktu itu Aristoteles menyebut politik dengan zoon politikon yang kemudian terus berkembang menjadi polites (warga negara), politeia (hal-hal yang berhubungan dengan negara), politika (pemerintahan negara), lalu terakhir menjadi politikos (kewarganegaraan). Politik sudah ada sejak dulu yang selalu di pakai dalam setiap kehidupan masyarakat dan dalam menjalankan suatu tongkat pemerintahan. Politik sangat-sangat dibutuhkan terkhusus dalam mencapai suatu tujuan individu, kelompok maupun golongan. Politik juga memiliki sistem yang disebut sebagai sistem politik, di Indonesia sendiri ada beberapa sistem yang dikenal yaitu; liberalisme, fasisme, komunisme, monarki, dan totaliterisme. Dalam mencapai tujuan dari politik tersebut, maka akan dibuat partai politik. Tujuan yang paling dapat dilihat dari partai politik tersebut adalah untuk mengusahakan para kader-kader partai agar menang pada masa pemilihan, baik presiden sampai kepada kepala daerah.

Received April 17, 2022; Revised Mei 21, 2022; Accepted Juli 31, 2022

\* Paiman Eliaezer Nadeak, [paimannadeak539@gmail.com](mailto:paimannadeak539@gmail.com)

Kepala daerah adalah seseorang yang memiliki kekuasaan dalam mengatur dan menjalankan kebijakan di suatu daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 63 1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dibantu oleh wakil kepala daerah. 2) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali kota.

Dalam penentuan kepala daerah cara yang dilakukan yaitu dengan cara pemilihan langsung atau disebut sebagai pemilu. Dalam pencalonan sebagai kepala daerah hal itu juga melibatkan politik di dalamnya hingga kepada langkah akhir yaitu kemenangan. Politik di dalam cakupan daerah kita kenal sebagai politik lokal. Maka dalam hal tersebut akan terjadi dinamika politik lokal, yaitu sebuah pergerakan politik di dalam daerah tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.

Melalui penjelasan diatas, maka penulis mendapat sebuah konsep pemikiran untuk melakukan kajian ataupun penelitian yang berjudul “Pengaruh Politik Lokal pada Pemilihan Kepala Daerah” setelah melihat besarnya peran politik lokal dalam memenangkan seseorang untuk menjadi kepala daerah. Adapun tulisan ini, menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi dokumentasi/literatur dalam pengumpulan data-data.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Elite Politik Lokal Pasca Reformasi**

Pasca reformasi, dengan sistem pemerintahan demokrasi terbuka memberikan ruang kepada kaum elite politik lokal dalam pergulatan–perebutan kekuasaan di tingkat lokal (Ali Imran, 2008). Melanjutkan narasi tersebut, Tahir et al., (2017) bahwa kemunculan elite politik lokal sejalan dengan kelahiran liberalisasi politik pasca reformasi. Politik di era reformasi dan desentralisasi dalam kontestasi Pilkada kerap memunculkan aktor politik yang memiliki relasi dengan orde baru. Legitimasi ekonomi menjadikan elite semakin kuat berkuasa secara politik. Patronase politik diperoleh melalui ikatan primordial yang kuat. Dan kelonggaran desentralisasi digunakan untuk mempersiapkan keluarganya sebagai pewaris takhta kekuasaannya (Eka Suaib & La Husen Zuada, 2015). Pemerintahan masih dikendalikan oleh keluarga yang bergabung dengan politik dengan modal yang cukup dan strategi yang baik (Putri Oktaviani et al., 2018). Dalam proses pemenangan Gubernur dan Bupati pada pemilihan daerah diperoleh melalui politik uang dan politik transaksional (As’ad, 2017).

## **Menguatnya Dinasti Politik**

Transisi demokrasi pasca Orde baru memberikan ruang kepada aktor nasional maupun lokal untuk terlibat dalam kontestasi pemilihan di daerah. Pelaksanaan demokrasi yang cenderung kapitalis dan pragmatis mengakibatkan mahalnya biaya politik. Sehingga, melahirkan aktor-aktor politik dalam pemilihan kepala daerah yang notabeneunya memiliki kemampuan dari aspek modal (uang) atau berlatar belakang sebagai pengusaha. Dengan demikian menciptakan pasar gelap dalam demokrasi, yakni kekuasaan diperoleh melalui transaksi jaringan patronase dan konsesi politik. Serta partai politik telah dikendalikan. Partai menjadi arena konspirasi antara rezim partai dan penguasa lokal (Herman & Uhaib, 2016). Akibatnya, desentralisasi yang di berikan sebagai efek reformasi menyisakan banyak masalah baru yang terus berlanjut, sebut saja misalnya, fenomena monism (dominasi politik keluarga) yang melahirkan kesenjangan (Firman, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77). Tulisan kali ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi dokumen/literatur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemilu adalah simbol demokrasi di negara ini. Hakikat demokrasi adalah memberikan ruang suara seluas-luasnya kepada setiap warga negara sebagai ekspresi hak asasi warga negara. Partisipasi Masyarakat dalam negara demokrasi merupakan indikator penting baik atau tidaknya proses demokrasi, dalam artian semakin rendah partisipasi dalam pemilihan umum maka semakin kurang baik proses demokrasi yang berjalan, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mendukung terbentuknya negara demokrasi yang baik, diperlukan partisipasi seluruh konstituen, terutama pemilih baru.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam negara demokrasi merupakan ciri dari modernisasi politik. Di negara-negara dengan proses demokrasi berjalan dengan baik, partisipasi warga secara umum meningkat. Modernisasi Politik dapat merujuk pada aspek politik dan pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian berupa pembagian kuisioner kepada mahasiswa FIS UNIMED Stambuk 2022, bahwasannya ada hampir 60% tidak pernah ikut

berpartisipasi dalam pemilu, sementara mereka sudah berusia 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Dalam hal ini dapat kita bahwa kurangnya partisipasi mereka dalam pemilu. Dari hasil kuisioner tersebut juga mereka dapat berpartisipasi dalam menjelang pemilu 2024, mereka juga menjawab pertanyaan yang dimana pertanyaan tersebut adalah “apa syarat dalam menggunakan hak pilih?” dari data yang didapat semua mahasiswa menjawab bahwa “orang yang berusia 17 tahun dan punya KTP bisa ikut memilih dalam pemilu”.

Mahasiswa FIS UNIMED Stambuk 2022 juga mengatkan bahwa partisipasi pemilih pemula atau partisipasi generasi muda sekarang sangat penting untuk meningkatkan pemilu di Indonesia, selain itu juga generasi muda sekarang adalah generasi penerus bangsa maka dari itu partisipasi anak muda sangat penting. Pemilih pemula mahasiswa FIS UNIMED Stambuk 2022 menunjukkan pilihannya dalam penelitian ini adalah mereka yang memilih seorang kandidat dengan melihat visi misi yang ditawarkan kandidat tersebut. Tetapi jika visi misi yang dibuat para calon jauh dari harapan mereka mahasiswa tersebut tetap memilih dengan suka rela.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisis Sikap Elite Politik Lokal terhadap Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, maka sesuai dengan masalah penelitian yang diangkat dapat disimpulkan, Setelah mengadakan wawancara dan melalui pengamatan serta melihat pada data yang berasal dari pemerintah maupun dari harian umum yang beredar maka dapat dikatakan bahwa para Elite Politik yang ada menyambut baik pelaksanaan PILKADA nantinya. Umumnya Elite dan masyarakat telah mengetahui bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Masyarakat mengetahui bahwa proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada umumnya tidak jauh berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dilaksanakan sebelumnya. Harus ada Sosialisasi yang mendalam dari pemerintah dalam hal ini adalah KPUD terhadap pelaksanaan PILKADA serta peran serta Elite dan partai politik yang ada. Dengan adanya keleluasaan yang dimiliki oleh partai politik dalam menentukan sendiri pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka bisa berimplikasi pada tidak efektifnya proses pencalonan yang dilaksanakan dengan mekanisme verifikasi atau konvensi yang dilakukan partai

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus, Aco, Dkk. 2020. Pengaruh Pengetahuan Politik Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pemilu 2019-2024. *Jurnal Pemikiran Dan Penilaianm Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*, Vol. 15 Tahun 2020
- Evendy Sondakh. “Analisis Sikap Elite Politik Lokal Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kota Manado”. *Jurnal Administrasi Bisnis*
- Rambe, T., Dkk. 2019. *Sejarah Politik dan Kekuasaan. Yayasan Kita Menulis*
- Widdy Yuspita Widiyaningrum. “KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH MELALUI STRATEGI AURA: SEBUAH KAJIAN TEORITIS”. *Jurnal JISIPOL*. Volume 5, Nomor 1, Januari 2021(52-64)
- Sherly Nur Nafisah. “Dinamika Politik Lokal dan Rekrutmen Pengusaha di Tingkat Lokal: Studi Tentang Pilkada Kabupaten Malang. Perpustakaan Universitas Airlangga
- Muhammad Rijal Fadli. “Memahami desain metode penelitian kualitatif”. *Humanika*. Volume 21. Nomor 1
- Mahmi Hikmat. 2021. Urgensi Partisipasi Gerakan Sosial Mahasiswa Dalam Peningkatan Kualitas Pemilu 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu vol.1 2021*